

Daftar Isi

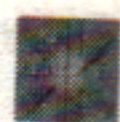
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I DASAR-DASAR FILSAFAT ILMU DAN FILSAFAT HUKUM	1
A. Filsafat Ilmu sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum	1
1. Pengertian dan Makna Filsafat Ilmu	1
2. Ruang Lingkup Filsafat Ilmu	6
3. Peranan Filsafat Ilmu Terhadap Ilmu Hukum	11
B. Antara Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum	13
1. Pengertian Ilmu Hukum	13
2. Pengertian Filsafat Hukum	15
C. Manfaat dan Tujuan Mempelajari Filsafat Hukum	20
1. Manfaat Mempelajari Filsafat Hukum	20
2. Tujuan Mempelajari Filsafat Hukum	24
D. Pandangan Filsafat Hukum tentang Hakikat Hukum	25
1. Aspek Ontologi Hukum	25
2. Aspek Epistemologi Hukum	26
3. Aspek Aksiologi Hukum	27
E. Paradigma Dasar Filsafat Hukum	29
1. Pandangan Terhadap Makna Hukum dan Teori Hukum	29
2. Pandangan Terhadap Sumber Hukum dan Sistem Hukum	34
3. Pandangan Terhadap Kaidah Hukum, Nilai, dan Norma Hukum	38
F. Filsafat Kebenaran dan Pengetahuan	44
1. Kebenaran dan Jenis-jenis Kebenaran	44
2. Pengetahuan dan Ukuran Kebenaran	49
3. Akal dan Wahyu sebagai Sumber Pengetahuan	54
BAB 2 PARADIGMA HUKUM, ALIRAN DAN MAZHAB FILSAFAT HUKUM	63
A. Paradigma Hukum dan Filsafat Hukum	63
B. Aliran dan Mazhab dalam Pemikiran Filsafat Hukum	71

1.	Aliran Hukum Alam	74
2.	Aliran Hukum Positif (Positivisme)	79
3.	Aliran Hukum Murni	82
4.	Aliran Utilitarianisme	84
5.	Aliran <i>Sociological Jurisprudence</i>	86
6.	Aliran Realisme Hukum	89
7.	Aliran Antropologis	93
8.	Aliran Hukum Islam	94
9.	Aliran Hukum Kritis (<i>Critical legal Studies</i>)	96
10.	Aliran Sejarah dan Kebudayaan	97
11.	Aliran Hukum Bebas	102
C.	Filsafat Hukum dalam Aliran <i>Civil Law</i> dan <i>Common Law</i>	102
1.	Aliran <i>Civil Law</i>	102
2.	Aliran <i>Common Law</i>	104
BAB 3	RUANG LINGKUP FILSAFAT HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	107
A.	Teori yang Berkaitan dengan Keadilan Hukum	107
1.	Teori Keadilan Aristoteles	108
2.	Teori Keadilan Plato	116
3.	Teori Keadilan John Rawls	119
4.	Teori Keadilan Adam Smith	129
B.	Hubungan Hukum dengan Keadilan	130
C.	Hubungan Hukum antara Hak dan Kewajiban	137
D.	Hubungan Hukum antara Moral, Nilai, dan Etika	140
1.	Tentang Moral	140
2.	Tentang Nilai	142
3.	Tentang Etika	143
E.	Hubungan antara Hukum dan Kekuasaan	144
1.	Legitimasi Kekuasaan	146
2.	Moralitas Kekuasaan	147
3.	Beberapa Pendapat Ahli tentang Kekuasaan	148
F.	Keberadaan Kedaulatan dalam Filsafat Hukum	151
1.	Kedaulatan dan Kekuasaan	151
2.	Perkembangan Kedaulatan dalam Filsafat Hukum	156
3.	Bentuk Kedaulatan Menurut Filsafat Hukum	161
G.	Filsafat Hukum dan Hak Asasi Manusia	164
1.	Pengertian Hak Asasi Manusia	165
2.	Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia	165
3.	Latar Belakang Lahirnya Hak Asasi Manusia	167



4.	Hak Asasi Manusia dan Wibawa Hukum	167
5.	Materi Muatan HAM dalam UUD 1945	168
6.	Materi Muatan HAM dalam Konstitusi RIS 1949	169
7.	Materi Muatan HAM dalam UUDS 1950	170
8.	Materi Muatan HAM Pasca Kembali ke UUD 1945	171
9.	Materi Muatan HAM dalam Peraturan Perundang-undangan	173
10.	Hak Asasi Manusia: Suatu Keniscayaan	175
BAB 4	KAIDAH DAN HUKUM PROGRESIF SERTA FILSAFAT HUKUM ISLAM	177
A.	Kaidah Hukum Perspektif Filsafat Hukum	177
1.	Pengertian Kaidah Hukum	177
2.	Sifat dan Bentuk Kaidah Hukum	178
B.	Filsafat Hukum dan Etika	181
1.	Pengertian Hukum	181
2.	Pengertian Etika	184
3.	Hubungan antara Hukum dan Etika	186
C.	Hukum Progresif Menurut Pandangan Filsafat Hukum	190
1.	Penegakan Hukum oleh Hakim Perspektif Teori Hukum Progresif	192
2.	Bentuk Putusan Hakim sebagai Implementasi Teori Hukum Progresif	199
D.	Filsafat Hermeneutika dalam Teori Penemuan Hukum	205
1.	Filsafat Hermeneutika	205
2.	Filsafat Hermeneutika sebagai Metode Penemuan Hukum	207
3.	Putusan Hakim dan Metode Hermeneutika	214
E.	Dasar-dasar Filsafat Hukum Islam	215
1.	Pemahaman Terhadap Filsafat Hukum Islam	215
2.	Objek Kajian dan Manfaat Filsafat Hukum Islam	217
3.	Sumber, Prinsip, dan Kaidah Hukum Islam	218
4.	Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia	220
5.	Tujuan Hukum Islam	222
6.	Jenis-jenis Kaidah Hukum Islam	223
7.	Teori Mashlahah dalam Hukum Islam	224
BAB 5	FILSAFAT PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT HUKUM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	233
A.	Pemahaman tentang Filsafat Pancasila	233
1.	Makna Filsafat Pancasila	233
2.	Karakteristik Pancasila	235

3.	Ontologi Pancasila	235
4.	Epistemologi Pancasila	236
5.	Aksiologi Pancasila	238
6.	Filsafat Hukum dan Pancasila	242
B.	Pancasila sebagai Norma, Nilai, dan Moral dalam Berbangsa	245
C.	Pancasila sebagai Sumber Hukum Indonesia	250
1.	Pancasila sebagai Landasan Etik dari Hukum	250
2.	Peran Filsafat Hukum di Indonesia	252
3.	Teori Hukum Pancasila dalam Pembangunan Hukum di Indonesia	256
4.	Hukum dalam Perspektif Pancasila	257
5.	Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945	260
D.	Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Fundamental Negara Indonesia	261
E.	Kedudukan Pancasila dari Tinjauan Formal dan Materiel	263
1.	Kedudukan Pancasila Ditinjau Secara Formal	263
2.	Kedudukan Pancasila Ditinjau Secara Materiel	264
3.	Nilai-nilai Pancasila	264
F.	Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Sistem Ketatanegaraan	267
G.	Korelasi antara Pancasila dengan Pembukaan UUD Tahun 1945	268
H.	Hubungan antara Pancasila dan Agama dalam NKRI	268
I.	Filsafat Hukum Pancasila dan Ideologi Negara	273
1.	Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara Indonesia	273
2.	Fungsi Filsafat Pancasila bagi Negara Indonesia	277
3.	Pancasila sebagai Dasar Filsafat Hukum Negara Indonesia	278
4.	Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia	285
J.	Pengertian Politik dan Dimensi Politis Manusia	290
1.	Pengertian Politik	290
2.	Fungsi Etika Politik	291
3.	Dimensi Politis Kehidupan Manusia	291
4.	Manusia sebagai Makhluk Individu Sosial	292
5.	Nilai-nilai Pancasila sebagai Sumber Etika Politik	292
BAB 6	ETIKA PROFESI HAKIM, KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN, DAN PERADILAN YANG AGUNG	295
A.	Objek Peradilan dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman	295
B.	Peradilan dan Hakim dalam Perspektif Islam	296
1.	Pengertian Lembaga Peradilan (<i>Qadha'</i>) dalam Islam	296
2.	Unsur-unsur Peradilan dalam Islam	297
3.	Profesi Hakim Menurut Perspektif Syariat Islam	298



C.	Sistem Pengawasan Mewujudkan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman	303
1.	Meningkatkan Sistem Pengendalian Diri	303
2.	Meningkatkan Pengawasan Melekat	304
3.	Meningkatkan Penanganan Pengaduan	304
4.	Meningkatkan Peran Pengadilan Tingkat Banding sebagai Bentuk Pedelegasian Wewenang oleh Mahkamah Agung RI	306
5.	<i>Reward dan Punishment</i>	307
6.	Sistem Promosi dan Mutasi	308
D.	Kebebasan Hakim dalam Kemandirian Kekuasaan Kehakiman	309
E.	Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Profesionalisme Hakim	312
F.	Refleksi Etika, Norma, Nilai, dan Moral Perspektif Profesionalisme Hakim	317
1.	Pengertian Etika	317
2.	Fungsi Etika	317
3.	Pengertian Norma	317
4.	Fungsi Norma	318
5.	Pengertian Nilai	318
6.	Pengertian Moral	318
7.	Pengertian Hierarki Nilai	319
8.	Hubungan antara Nilai, Norma, dan Moral	320
G.	Pembinaan Mahkamah Agung dan Peradilan yang Agung	322
1.	Usaha-usaha Optimalisasi Pelaksanaan Fungsi Hakim	322
2.	Peningkatan Mutu Pengadilan	324
H.	Upaya Mahkamah Agung Mewujudkan Peradilan yang Agung	326
1.	Melaksanakan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Secara Independen dan Efektif dan Berkeadilan	327
2.	Dukungan Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja	328
3.	Memiliki Struktur Organisasi yang Tepat dan Manajemen Organisasi yang Jelas dan Terukur	329
4.	Menyelenggarakan Manajemen dan Administrasi Proses Perkara yang Sederhana, Cepat, Tepat Waktu, Biaya Ringan, dan Proporsional	330
5.	Mengelola Sarana Prasarana dalam Rangka Mendukung Lingkungan Kerja yang Aman, Nyaman, dan Kondusif bagi Penyelenggaraan Peradilan	331
6.	Mengelola dan Membina Sumber Daya Manusia yang Kompeten dengan Kriteria Objektif, Sehingga Tercipta Personel Peradilan yang Berintegritas dan Profesional	331
7.	Didukung Pengawasan Secara Efektif Terhadap Perilaku, Administrasi, dan Jalannya Peradilan	332

8.	Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Prima	333
9.	Memiliki Manajemen Informasi yang Menjamin Akuntabilitas, Kredibilitas, dan Transparansi	333
10.	Modern dengan Berbasis Teknologi Informasi	333
I.	Indikator Peradilan yang Agung	334
1.	Ciri-ciri Peradilan yang Agung	334
2.	Pengadilan yang Bersih dan Berwibawa	336
3.	Pelayanan Publik yang Prima	339
4.	Sinergi antara Indikator Peradilan yang Agung dan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan	341
J.	Kebahagiaan sebagai Tujuan Etika dan Moral	343
1.	Kebahagiaan dan Kesusilaan	343
2.	Kebahagiaan, Pemeliharaan, dan Pengobatan Rohani	347
3.	Kebahagiaan dan Kesempurnaan Akal	348
	DAFTAR PUSTAKA	357
	INDEKS	373
	PROFIL PENULIS	379

